



► KEMISKINAN EKSTREM

Target Sasaran Bansos Belum Tercapai

DANUREJAN—Dinas Sosial (Dinsos) DIY menyatakan target sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Bumi Mataram belum mencapai target. Dari 8.000 sasaran, baru terkover sebanyak 7.338 penerima.

Yosef Leon Pinsker
yosef@harianjogja.com

Kepala Dinsos DIY, Endang Patmintarsih mengatakan program baru dijalankan pada

► Ada sejumlah calon penerima bansos yang sudah menerima program bantuan lain dari pemerintah sehingga tidak sesuai kriteria

► Dalam penyaluran, Dinsos menggandeng Bank BPD DIY dan sejumlah warung di setiap wilayah.

2024 dan belum bisa mencapai target sasaran. Hal ini terjadi karena banyaknya data calon penerima yang tidak valid akibat meninggal dunia atau pindah alamat. "Ada juga calon penerima bansos yang sudah menerima program bantuan

lain dari pemerintah sehingga tidak sesuai kriteria," katanya, Senin (4/3).

Endang menjelaskan, data tersebut berasal dari masing-masing kabupaten/ kota dan sudah ditetapkan oleh bupati dan wali kota. Persoalan ini akan dievaluasi, termasuk validasi data. "Sebanyak 8.000 sasaran itu merupakan target tahun pertama penyaluran bansos. Kalau belum mencapai target, maka dievaluasi lagi agar data benar-benar valid," katanya.

Besaran anggaran dalam bansos untuk penanganan kemiskinan ekstrem yang digulirkan Pêmda DIY sebesar Rp300.000 per bulan. Dalam penyaluran, Dinsos menggandeng Bank BPD

DIY dan sejumlah warung di setiap wilayah. Nantinya, BPD DIY memberikan kode batang atau *barcode* yang berisi saldo kepada penerima bantuan untuk ditukarkan dengan sembako dan kebutuhan pokok. "Kami juga melibatkan warung kelontong lokal agar perekonomian masyarakat bisa terus berjalan," katanya.

Tolak Penggunaan BOS

Di sisi lain, PGRI DIY tak setuju jika anggaran program ini diambil dari dana BOS. "Kalau dana BOS dikurangi untuk program makan siang gratis, maka jelas anggaran operasional sekolah bakal berkurang. Kalau tetap menggunakan BOS, maka anggaran harus ditambah," kata Aji.

Ketua PGRI DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan jajarannya menyetujui program makan siang gratis untuk anak sekolah. Terlebih, selama ini makan siang gratis baru dilaksanakan di jenjang SLB, sehingga jika diperluas ke jenjang pendidikan lain, maka bisa membuat anak-anak semakin bersemangat untuk bersekolah.

Meski demikian, PGRI tak setuju jika anggaran program ini diambil dari dana BOS. "Kalau dana BOS dikurangi untuk program makan siang gratis, maka jelas anggaran operasional sekolah bakal berkurang. Kalau tetap menggunakan BOS, maka anggaran harus ditambah," kata Aji.

Menurutnya, dana BOS saat ini sifatnya baru bantuan dan belum bisa mencukupi semua kebutuhan operasional sekolah. Untuk makan siang gratis di jenjang SLB, selama ini dananya menggunakan Bosda.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sumber anggaran untuk memenuhi program makan siang sebesar Rp15.000 per anak sangat memungkinkan berasal dari dana BOS. Airlangga mengatakan untuk jenjang SD dan SMP, sumber dana makan siang gratis dapat masuk ke dalam program BOS. "Untuk SD dan SMP sudah punya sistem, punya *pipeline* anggaran, salah satunya melalui BOS," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005